

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN *CORPORATE
GOVERNANCE* PADA LAPORAN TAHUNAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45
Bursa Efek Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

PETRI NATALIA

C2C008107

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Petri Natalia

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008107

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE PADA LAPORAN
TAHUNAN
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar
dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 19 September 2012

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)

NIP. 195805251991032001

PENGESAHAN LULUS UJIAN

Nama Penyusun : Petri Natalia

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008107

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE PADA LAPORAN
TAHUNAN
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar
dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 Oktober 2012

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt. (.....)

2. Faisal, SE, M.Si (.....)

3. Fuad, SET, M.Si, Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Petri Natalia, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Governance* pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 September 2012

Yang membuat pernyataan,

(Petri Natalia)

MOTTO

"Ber-metamorfosis-lah seperti kupu-kupu yang tak ingin menjadi 'rupanya dulu'. Harus berjuang agar makin hari makin serupa dengan Kristus!"

"Keep Challenging yourself, never be satisfied, and make sure you are always perform beyond expectation."

PERSEMBAHAN

**"Kado terlambat" ini penulis persembahkan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ke 26 tahun Bp. Ir. Imm. Slamet Priyanto dan Ibu Dwi Retno Martiyanti ~
2 Agustus 1986 - 2 Agustus 2012**

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence corporate governance disclosure in annual reports. The factors tested in this study are the independence of audit committees, firm size, profitability, leverage, and industry classification.

Collecting data is using purposive sampling method to the companies listed in the LQ-45 Indonesian Stock Exchange during 2010-2011. A total of 78 companies in used as sample in this research. There are 93 items to detect broad disclosure of corporate governance disclosure.

This research uses multiple regression were used to examine the factors that influence corporate governance disclosure. The results of this research showed that the independent variables that significantly affect the disclosure of corporate governance is the independence of the audit committee and industry classifications. However, firm size, profitability, leverage and showed no significant effect on corporate governance disclosure.

Keywords: Annual Reports, Corporate Governance, Corporate Governance Disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan klasifikasi industri.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2011. Sebanyak 78 perusahaan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Terdapat 93 item pengungkapan untuk mendeteksi luas pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan regresi berganda yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* adalah independensi komite audit dan klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Kata kunci: Laporan Tahunan, *Corporate Governance*, Pengungkapan *Corporate Governance*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan anugerah dan penyertaan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* PADA LAPORAN TAHUNAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Laporan LQ-45 Bursa Efek Indonesia), dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Diponegoro Semarang.
3. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing. Terima kasih untuk segala bimbingan dan waktu yang telah diberikan hingga skripsi dapat diselesaikan.
4. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, M.Si., Akt., selaku dosen wali. Terima kasih untuk bimbingan yang diberikan.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi penyertaan dan kekuatan kepada penulis.

7. Bapak Ir. Imm. Slamet Priyanto, MS., Ibu Dwi Retno Martiyanti, Prita Tamariska, dan Petra Lustriadi sebagai keluarga yang luar biasa bagi penulis.
8. Mentor sejati penulis Mas Ferry Adriawan Pramono yang super sibuk namun masih menyempatkan sedikit waktunya untuk membimbing penulis. Mona Manurung dan Wulandari Nursetyorini yang mau membantu penulis dalam pengolahan data.
9. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, dan teman-teman tempat penulis merasakan segala rasa kehidupan ke-mahasiswa-an yang ada, yang bisa dirasakan manusia, dan mempelajarinya sebagai step lanjut pertumbuhan iman dan kedewasaan: Hansen, Dina, Mike, Yeyen, Bima, Velin, Yemima, Mona, Ardi, Korbidku tergantung Bang Arif Tison Situmorang beserta rekan-rekan CICO 2010-ku (Bina n Wahyu), anak-anak CICO 2011-ku (Petrus, Togi, Deka), Winda, Vera, Kak Lidya, Cizna, Gedie, Fendy, Akuners'08 (Wulan, Anita, Monica, Tere, Cahya, Riasti), segenap pengurus Obkial 2010-2011 PMK FEB, segenap pengurus PMK FEB periode 2010 & 2011, segenap PMKers 2008, dan segenap alumni PMK FEB yang tak bisa penulis tulis satu per satu.
10. Segenap keluarga besar PMK FEB Undip untuk kesempatan melayani di dalamnya.
11. Teman-teman KKN UNDIP 2012, desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus : Hesti, Eci, Bayu, Hany, Catur, Mas Yunas, Wisnu, dan Anggi untuk kebersamaan yang singkat namun berkesan.
12. Teman-teman Akuntansi reguler 1 2008 untuk kebersamaan dan kerja samanya.
13. Pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan tulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 19 September 2012

Penulis,

Petri Natalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Teori Keagenan.....	11
2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan.....	14
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	16
2.1.4 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	18
2.1.5 Partisipan <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.6 Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> dalam Laporan Tahunan...	23
2.1.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	31
2.1.7.1 Independensi Komite Audit.....	31
2.1.7.2 Ukuran Perusahaan.....	32
2.1.7.3 Profitabilitas.....	33
2.1.7.4 <i>Leverage</i>	35
2.1.7.5 Klasifikasi Industri.....	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Pemikiran.....	43
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	44
2.4.1 Independensi Komite Audit.....	44
2.4.2 Ukuran Perusahaan.....	45

2.4.3	Profitabilitas.....	46
2.4.4	<i>Leverage</i>	48
2.4.5	Klasifikasi Industri.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....		50
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasi.....	50
3.1.1	Variabel Dependen.....	50
3.1.2	Variabel Independen.....	51
3.1.2.1	Independensi Komite Audit.....	51
3.1.2.2	Ukuran Perusahaan.....	52
3.1.2.3	Profitabilitas.....	52
3.1.2.4	<i>Leverage</i>	53
3.1.2.5	Klasifikasi Industri.....	53
3.2	Populasi dan Sampel.....	54
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	55
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5	Metode Analisis Data.....	56
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	56
3.5.2	Analisis Regresi Berganda.....	56
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.5.3.1	Uji Normalitas.....	57
3.5.3.2	Uji Multikolinearitas.....	58
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	59
3.5.3.4	Uji Autokorelasi.....	60
3.5.4	Uji Hipotesis.....	60
3.5.4.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	60
3.5.4.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	61
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	61
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		62
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	62
4.2	Analisis Data.....	63
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	63
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	65
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	67
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	68
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	69
4.2.3	Uji Hipotesis.....	71
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	71
4.2.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	72
4.2.3.3	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	72
4.2.4	Pengujian Hasil Hipotesis.....	74
4.3	Interpretasi Hasil.....	76

4.3.1	Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan CG.....	76
4.3.2	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CG.....	77
4.3.3	Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan CG.....	78
4.3.4	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan CG.....	79
4.3.5	Pengaruh Kasifikasi Industri terhadap Pengungkapan CG.....	79
BAB V PENUTUP.....		82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Keterbatasan.....	84
5.3	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN.....		88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Item Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	27
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian	62
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian	63
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov Smirnov</i>	66
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	43
Gambar 4.1 Grafik Histogram	65
Gambar 4.2 Grafik Normal Plot	66
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Daftar Perusahaan LQ45 yang Menjadi Sampel	89
LAMPIRAN B Data Sekunder Variabel-variabel Penelitian	91
LAMPIRAN C Hasil Statistik Deskriptif	95
LAMPIRAN D Uji Asumsi Klasik	96
LAMPIRAN E Hasil Uji Regresi Berganda	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus skandal korupsi dan penipuan akuntansi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terkemuka seperti Enron Corporation (US), Barings Empire (UK), WorldCom, dan Permalat (Italia), berakar dari kurangnya sistem tata kelola perusahaan yang baik (Muhamad *et al.*, 2009). Di dalam negeri sendiri terdapat contoh kasus akibat kurangnya sistem tata kelola perusahaan yang tepat, seperti *insider trading* saham PT Bank Central Asia, Tbk serta *overstated* laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk. (Rini, 2010).

Dampak dari skandal korupsi dan penipuan akuntansi tersebut adalah adanya pemberhentian ribuan pekerja. Dampak yang paling utama adalah munculnya keraguan masyarakat atau pemangku kepentingan pada perusahaan dan institusi pendukungnya. Iskandar dan Chamlou (dalam Hidayah, 2008) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya bukan hanya akibat dari faktor ekonomi makro, tetapi juga karena lemahnya *good corporate governance* yang ada pada negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi, dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *non-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Oleh karena itu, *corporate governance* menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung

pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang.

Berkembangnya isu mengenai *corporate governance* mendorong adanya peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek *corporate governance* suatu perusahaan, baik oleh investor maupun pemerintah melalui penyusunan peraturan atau standar *corporate governance*. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, dan yang paling utama adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Survey yang dilakukan oleh Mc.Kinsey dan Co (dalam Isgiyarta dan Tristiarini, 2005) menjelaskan bahwa pada 189 perusahaan publik di enam *emerging market*, yaitu: India, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki menunjukkan eratnya kaitan antara penerapan *good corporate governance* dengan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena hampir 75% investor menganggap keterbukaan dan informasi mengenai penerapan *corporate governance* sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan. Investor bersedia memberikan insentif yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance*. Bahkan beberapa pihak menganggap informasi mengenai penerapan *good corporate governance* lebih penting daripada laporan keuangan perusahaan.

Isu CG (*Corporate Governance*) sebenarnya sudah ada sejak lama sebelum terungkapnya masalah-masalah seperti tersebut di atas, namun dengan meningkatnya kompleksitas perusahaan dan bertambahnya tuntutan dari banyak

pihak, CG berkembang menjadi isu yang lebih dikenal. Hal ini menggambarkan pentingnya CG dalam mengawal manajemen (yang diwakili oleh dewan direksi) dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada. (Muhamad *et al.*,2009)

Rezaee (2009) menggambarkan *corporate governance* sebagai proses yang berkelanjutan dan terus menerus dalam mengelola, mengendalikan, dan menilai urusan bisnis untuk menciptakan nilai pemegang saham (*shareholder*) dan melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Definisi menurut Rezaee tersebut menggambarkan fungsi CG sebagai alat untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham demi menghindari masalah berbagai benturan kepentingan. Menurut Rezaee (2009), terdapat tujuh fungsi esensial dari CG, yaitu: pengawasan, manajerial, pemenuhan, audit internal, *advisory*, audit eksternal, dan pemantauan.

Berbagai respon akibat isu *Corporate Governance* mengemuka dari berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, respon terhadap perkembangan isu mengenai *good corporate governance* dapat ditandai dari respon pemerintah yang membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999, yang kemudian berubah nama menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada November 2004 berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP-49/M.EKON/11/2004. KNKG merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan *good governance* di Indonesia secara komprehensif dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang isu *governance* di sektor publik

maupun privat (Warsono dkk., 2009). Pembentukan komite ini menghasilkan pedoman umum *good corporate governance* pada tahun 2006. Pedoman ini bukan merupakan peraturan perundangan sehingga tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat.

Pada tahun 2000, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-MAC), *Indonesian Financial Executives Assosiation* (IFEA), *Indonesian Netherlands Assoiation* (INA), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) membentuk forum yang bernama *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). FCGI memiliki tujuan utama meningkatkan ketanggapan dan menyosialisasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) kepada komunitas bisnis Indonesia sehingga dapat memperoleh banyak manfaat dari terciptanya pengelolaan perusahaan yang sehat (Warsono dkk., 2009), sedangkan BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006. Keputusan dan peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua emiten dan perusahaan publik karena terdapat kekuatan hukum dan juga menimbang bahwa laporan tahunan merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat

keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai hal-hal yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam membuat laporan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dilakukan demi menumbuhkan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi CG menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki Komite Audit lebih cenderung memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi. Ditemukan bahwa proporsi anggota komite audit yang independen dalam perusahaan dapat memantau pengelolaan sebuah perusahaan, dengan demikian dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan atau penipuan. Oleh karena itu, Ho dan Wong mengemukakan bahwa proporsi anggota komite audit yang independen dalam perusahaan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan dan kualitas pengungkapannya.

Kusumawati (2007) menemukan bahwa besaran atau ukuran perusahaan lah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengungkapan luas *corporate governance*. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh publik sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas publik.

Singhvi dan Desai (1971) dalam Muhamad *et al.*, (2009) menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* juga berpengaruh signifikan terhadap luas

pengungkapan *corporate governance*. Mereka berpendapat bahwa pendapatan tinggi memotivasi manajemen untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih besar untuk memberikan jaminan kepada investor. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan juga berpengaruh penting dalam rangka untuk meyakinkan kreditor mereka, bahwa mereka memiliki sumber dana yang cukup untuk mendanai bisnis dalam jangka panjang.

Jensen dan Mekling (1976) berpendapat bahwa *leverage* perusahaan yang lebih tinggi dikenakan biaya *monitoring* yang lebih tinggi di mana dewan atau manajemen cenderung untuk meningkatkan tingkat pengungkapan untuk tujuan pemantauan. Oleh karena itu, profitabilitas dan *leverage* dianggap memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance*.

Beberapa literatur yang sudah ada menunjukkan bahwa jenis industri juga merupakan salah satu variabel yang menentukan tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Meek *et al.*,1995). Meek *et al* (1995) berpendapat bahwa jenis industri adalah faktor yang paling penting dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa *Corporate Governance* dimaksudkan untuk tujuan yang lebih luas, yaitu untuk kepentingan *stakeholders*, dibanding sebatas pemegang saham (Solomon, 2007). *Corporate Governance* mencakup usaha pencapaian tujuan jangka panjang, yaitu pencapaian tujuan kesejahteraan *stakeholders* yang merujuk kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasi perusahaan.

Berkembangnya praktik penerapan CG dan semakin ketatnya aturan atau regulasi pengungkapan CG di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CG pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia. Penulis menetapkan perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam LQ-45 sebagai sampel penelitian karena LQ-45 merupakan kumpulan saham teraktif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga para investor menaruh perhatian lebih terhadap perusahaan-perusahaan ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Governance* pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia).”**

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency*, yang menekankan pada penyediaan dan pengungkapan informasi yang material dan relevan, baik itu merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh regulator maupun pengungkapan yang bersifat sukarela. Berbagai kasus kegagalan perusahaan besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,

mendorong investor untuk lebih memperhatikan pengungkapan informasi perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Faktor-faktor tersebut diprediksikan adalah independensi komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan klasifikasi industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah independensi komite audit dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Governance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Governance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Governance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Governance*?
5. Apakah klasifikasi industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Governance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada sub bab tujuan, akan dijelaskan tujuan yang akan dicapai sekaligus menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, sedangkan pada sub bab kegunaan penelitian akan dijelaskan manfaat dari penelitian ini.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh independensi komite audit dalam perusahaan terhadap pengungkapan *corporate governance*.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate governance*.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate governance*.
4. Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate governance*.
5. Pengaruh klasifikasi industri terhadap pengungkapan *corporate governance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menumbuhkan kesadaran bagi perusahaan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasi dengan informasi pengungkapan *corporate governance*.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi calon kreditur dalam mengambil keputusan pemberian kredit pada perusahaan.
4. Menambah studi literatur tentang kualitas pengungkapan *corporate governance* dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, Telaah Pustaka. Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menguraikan pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel dependen, independen, serta variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian.

Bab III, Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang deskripsi operasional penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang deskripsi objektif dan analisis data, serta beberapa pengujian yang dilakukan sebelum menganalisis data, antara lain uji normalitas data dan uji autokorelasi.

Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan hasil penelitian. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan dan saran-saran penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance*. Selain itu, dalam telaah pustaka juga dibahas hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang sejenis. Oleh karena itu, secara sistematis, bab ini mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Salah satu teori yang mendasari penelitian mengenai *corporate governance* adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Menurut Malin (2003), CG dapat dipandang dari *agency perspective*. Teori agensi memposisikan suatu masalah bahaya moral dari hubungan pemilik-manajer yang menimbulkan biaya agensi (Coles, McWilliams, and Sen, 2001; Jensen dan Meckling, 1976). Awalnya, masalah keagenan (*agency problem*) dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksposisi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Lebih lanjut, definisi hubungan agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Tan (2003) adalah:

“...a contract relationship which one or more person (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa teori keagenan merupakan suatu hubungan kontrak antara satu atau lebih pihak (*principal*) terhadap pihak lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama mereka (*principal*) yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen. Dari pengertian di atas, Jensen dan Meckling menyebut manajer perusahaan sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* (Warsono dkk., 2009). Kemudian, Warsono dkk., (2009) dan Tan (2003) menyatakan bahwa pemegang saham (*principal*) mendelegasikan wewenangnya untuk mengambil keputusan bisnis kepada manajer (*agent*), yang merupakan perwakilan dari pemegang saham. Tetapi dalam hubungan tersebut terdapat kepentingan ekonomis yang dapat membuat agen tidak dapat selalu membuat keputusan bisnis yang sesuai dengan kepentingan *principal* (Warsono dkk., 2009 dan Elqorni, 2011).

Menurut Eisenhardt (dikutip oleh Warsono dkk., 2009), teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari teori Eisenhardt di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi yang utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya berusaha untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer cenderung untuk menunjukkan “egoisme” (perilaku yang mengarahkan mereka untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri). Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*), salah satunya adalah dengan melakukan penerapan dan pengungkapan terkait isu CG. Dengan penerapan CG, diharapkan perusahaan (*agent*) dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai *principal* (Warsono *et al.*, 2009) sehingga konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat diminimalkan. Dalam menanggulangi masalah asimetri ini, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan dan mengimplementasikan CG dengan baik dan benar demi membuktikan komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan sehingga dapat mengurangi resiko yang terburuk, yaitu kebangkrutan perusahaan.

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)

Teori lain yang banyak dipakai dalam mengungkapkan isu-isu *corporate governance* adalah teori *Stakeholder* karena teori ini mampu menjelaskan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Teori *Stakeholder* berkembang secara bertahap sejak tahun 1970an. Dasar dari teori ini adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat *pervasive* sehingga perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada pemegang sahamnya saja.

Friedman (1962) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa tujuan utama pemegang saham adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemegang saham dianggap sebagai satu-satunya pemangku kepentingan. Namun, dalam dekade terakhir, pandangan tentang istilah pemangku kepentingan telah berubah. Freeman (1984) dalam Chariri dan Ghozali (2007) memperluas pandangan tentang istilah pemangku kepentingan dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak. Istilah “pemangku kepentingan” (*Stakeholders*) yang diungkapkan oleh Freeman (1984) dalam Chariri dan Ghozali (2007) selaras dengan istilah pemangku kepentingan yang diungkapkan Warsono dkk. (2009). Menurut Warsono dkk. (2009), pemangku kepentingan atau *stakeholders* adalah:

“pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi. Pemangku kepentingan perusahaan dapat meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, media, pemerintah, asosiasi profesi dan asosiasi

perdagangan, aktivis sosial dan lingkungan, dan organisasi-organisasi non pemerintah.”

Dari istilah di atas dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang signifikan dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Perusahaan mempunyai hubungan yang kompleks dengan banyak individu dan organisasi dalam masyarakat. Istilah “pemangku kepentingan” (*stakeholders*) merujuk kepada semua pihak yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Kemampuan perusahaan berkontribusi kuat terhadap keberhasilan maupun kegagalan perusahaan. Membangun hubungan positif dan saling menguntungkan antar batasan-batasan organisasional menjadi bagian yang semakin besar dari peran manajemen. Adalah benar bahwa perusahaan harus menghasilkan laba bagi pemiliknya, karena jika tidak menghasilkan laba, maka perusahaan tersebut tidak dapat bertahan hidup. Namun demikian, perusahaan juga harus menciptakan nilai-nilai lain, misalnya pengembangan profesional bagi karyawan mereka dan produk-produk baru yang inovatif bagi para pelanggan mereka. Berdasarkan sudut pandang ini, perusahaan menjalankan banyak kewajiban, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan harus dipertimbangkan, oleh karena itu, *corporate governance* memberikan panduan bagi perusahaan untuk dapat memaksimalkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ-organ perusahaan sehingga tujuan para pemangku kepentingan dapat tercapai.

2.1.3 *Corporate Governance*

Frasa *Corporate Governance* terdiri dari dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*. Kata *corporate* merupakan kata sifat (*adjective*) yang bermakna “berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan”. Kata *governance* merupakan kata benda (*noun*) yang bermakna “pengelolaan”. Di Indonesia, sebagian literatur menerjemahkan *corporate governance* sebagai tata-kelola. (Warsono dkk., 2009)

Menurut Solomon (2007), istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Report* pada tahun 1992. *Cadbury Report* dianggap sebagai titik tolak praktik CG di seluruh dunia. Tiga area utama yang menjadi perhatian komite *Cadbury* adalah *Board of Director* (BoD), Audit, dan pemegang saham (Warsono dkk., 2009). Di Inggris, *Cadbury Report* ini menjadi landasan dibentuknya komite untuk penyusunan pedoman praktik CG lainnya, yaitu *Greenbury Committee*, *Hampel Committee*, *Turnbull Committee*, dan *Higgs Committee*. Belum ada definisi tunggal atas CG (Anand, 2008; Rezaee, 2007 dalam Warsono dkk., 2009). Menurut Solomon (2007), pendekatan atas CG mengadopsi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan kontemporer. Pendekatan konvensional menurut Parkinson (1994) sebagai berikut:

“...the process of supervision and control intended to ensure that the company's management acts in accordance with the interests of shareholders.”

Dari pernyataan Parkinson di atas, digambarkan bahwa CG adalah proses supervisi dan pengendalian yang bermaksud untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selaras dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham. Definisi yang diungkapkan oleh Parkinson ini berfokus pada hubungan antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham.

Definisi lain dari perspektif kontemporer dikemukakan oleh Tricker (1984) dalam Warsono dkk. (2009) sebagai berikut:

“...the governance role is not concerned with the running of the business of the company per se, but with giving overall direction to the enterprise, with overseeing and controlling the executive actions of management and with satisfying legitimate expectations of accountability and regulation by interests beyond the corporate boundaries.”

Dari sudut pandang kontemporer menurut Tricker di atas, definisi digambarkan sebagai suatu jaringan hubungan antara sekelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak hanya pemegang saham (*stockholders*).

Lebih lanjut, Cannon (1994) dalam Solomon (2007) mengungkapkan definisi CG yang dilihat berdasarkan peraturan yang dibuat (*regulation-centred*), yaitu:

“...the governance of an enterprise is the sum of those activities that make up the internal regulation of the business in compliance with the obligation placed on the firm by legislation, ownership, and control. It incorporates the trusteeship of assets, their management and their deployment.”

Dari pernyataan Canon di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi *corporate governance* digambarkan sebagai jumlah dari kegiatan-kegiatan yang membentuk

peraturan internal bisnis dalam memenuhi kewajiban, ditempatkan pada perusahaan oleh undang-undang, kepemilikan, dan pengendalian. Ini mencakup perwalian aset, manajemen dan penyebaran mereka.

Di Indonesia sendiri, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan CG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Dari definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa CG adalah seperangkat aturan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa aktivitas dan tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan menyejahterakan para pemangku kepentingan, tidak semata-mata mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.

2.1.4 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Dalam pencapaian tujuan jangka panjang, selain merumuskan definisi CG, entitas CG juga mengembangkan asas-asas atau prinsip-prinsip CG. OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) mengembangkan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan.
4. Keterbukaan dan transparansi.

5. Akuntabilitas dewan komisaris.

Sedangkan di Indonesia, KNKG (2006) menetapkan lima prinsip CG yang tercantum dalam “Pedoman Umum *Good Corporate Governance*”, yaitu:

1. Transparansi.

Transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi.

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5 Partisipan *Corporate Governance*

Partisipan merupakan organ perusahaan yang sangat berperan penting untuk menegakkan CG di perusahaan. Dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, partisipan menentukan arah perkembangan dan kebijakan perusahaan. Dengan kata lain, baik atau buruknya CG tergantung pada apa yang dilaksanakan partisipan dan bagaimana partisipan berupaya untuk menjalankan fungsi tersebut sesuai prinsip-prinsip CG yang dianut (Warsono dkk., 2009).

Terdapat lima jenis partisipan CG yang meliputi:

1. *Boards of Directors* (BoD) : organ perusahaan yang fungsi utamanya adalah memberi perhatian secara bertanggung jawab (*oversight*) atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
2. *Chief Executive Officers* (CEO) : Organ perusahaan yang bertugas menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan mengamankan aset perusahaan.

3. *Board of Commissioners (BoC)* :
 - a. *One Tier System (Anglo Saxon)* : Sistem yang mempunyai satu BoD yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non-Direktur Eksekutif).
 - b. *Two Tier System (Kontinental Eropa)* : Sistem yang mempunyai dua badan terpisah, yaitu BoC dan BoD. BoD bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahannya dan pengawasan BoC. Dalam sistem ini, anggota BoD diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh BoC. BoD juga harus memberikan informasi kepada BoC dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh BoC. Dengan demikian, BoC terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.
4. Auditor :
 - a. Auditor Internal : Karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Audit internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan (Halim, 2001).
 - b. Auditor Eksternal : Para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit laporan keuangan kepada klien, selain itu, auditor eksternal juga dapat mengerjakan jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya (Halim, 2001).

5. *Stakeholders* (pemangku kepentingan):

- a. Pemegang Saham : Pemilik modal perusahaan yang memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pedoman Umum GCG KNKG, 2006).
- b. Karyawan : Aset perusahaan yang sangat penting yang bertugas melaksanakan operasi perusahaan dengan tujuan utama memenuhi kepentingan pelanggan (Colley *et al.*, 2005). Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, lingkungan kerja yang kondusif, kepuasan dalam bekerja, dan kompensasi yang sesuai.
- c. Pelanggan.
- d. Komunitas / Masyarakat sosial.
- e. Kreditor : Pihak yang memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu kepada perusahaan untuk memperoleh modal
- f. Pemerintah : Pihak yang memastikan bahwa perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor yang meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitas bursa efek, Bapepam-LK, dan Departemen Keuangan RI. Setiap lembaga di atas mengeluarkan standar pengelolaan keuangan perusahaan dan menuntut untuk dipatuhi / dipenuhi oleh perusahaan.

2.1.6 Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga laporan non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas manajemen atas kinerja pengelolaan perusahaan kepada para investor sebagai pemilik (Warsono dkk.,2009).

Darrough (dalam Na'im dan Rakhman, 2000) mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*):

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*):

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) mengemukakan bahwa meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke

pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Sementara itu, kata *disclosure* atau pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Data di sini dapat berupa informasi keuangan dan informasi non-keuangan perusahaan yang relevan dalam pengambilan keputusan (Chariri dan Ghozali, 2007).

Casabona (2005) dalam Yuen, *et al.* (2010) mencatat bahwa kreditur dan investor global membuat keputusan investasi mereka berdasarkan berbagai informasi keuangan dan non-keuangan yang dipublikasikan, serta *economic reports* yang dikeluarkan oleh perusahaan publik. Adapun ketentuan umum mengenai bentuk dan isi laporan tahunan Emiten / Perusahaan Publik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KEP-134/BL/2006, adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Data Keuangan Penting
2. Laporan Dewan Komisaris
3. Laporan Direksi
4. Profil Perusahaan
5. Analisis dan Pembahasan Manajemen
6. *Corporate Governance*
7. Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
8. Laporan Keuangan yang Telah Diaudit.

Dalam ketentuan tersebut di atas, salah satu *item* yang harus dimuat adalah informasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Praktik pengungkapan akuntansi di Indonesia mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan adalah PSAK No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAK No. 1 par 12 menyatakan bahwa:

Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan laporan keuangan, penyajian laporan tambahan juga diperlukan untuk membuat keputusan yang wajar dan relevan, termasuk informasi tentang CG demi melindungi kepentingan *stakeholders*.

Dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), asimetri informasi merupakan keadaan di mana perusahaan mengetahui pengetahuan lebih luas tentang aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan investor yang sudah ada maupun investor potensial. Keadaan ini juga berlaku dalam teori *stakeholder*, di mana informasi yang tidak memadai dialami oleh semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Tanpa sebuah sistem yang terstruktur dari pengungkapan dan dalam pelaporan keuangan dalam bagian khusus, akan sangat sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi

yang tepat dan dapat diandalkan, dan asimetri informasi yang terjadi akan menyebabkan *moral hazard* dan masalah *adverse selection* (Solomon, 2007). Dengan menerbitkan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan, khususnya mengenai CG, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya akan dapat memantau kinerja perusahaan dan mengambil keputusan secara lebih baik.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan *corporate governance* diatur oleh BAPEPAM. BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan yang memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan tahunan terakhir. Peraturan tersebut memuat 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen resiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data perusahaan, etika perusahaan, tanggung jawab sosial, pernyataan penerapan *good corporate governance*, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas *point item* tersebut memuat 93 *item* pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 ini diterbitkan dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *checks and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Demi kepentingan ini, maka BAPEPAM mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) yang mengatur tentang standar-standar pengungkapan *corporate governance* yang sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan. *Item-item* tersebut terangkum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Item Pengungkapan Corporate Governance

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1.	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham. 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. 3. Tanggal pelaksanaan RUPS. 4. Hasil RUPS
2.	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris. 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Latar belakang pendidikan dan karier Dewan Komisaris 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. 7. Jumlah rapat yang dihadiri. 8. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. 9. Mekanisme pengambilan keputusan. 10. Program pelatihan Dewan Komisaris.

3.	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota Direksi. 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 5. Mekanisme pengambilan wewenang. 6. Mekanisme pendelegasian wewenang. 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi 8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi 9. Jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat 10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi 11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi
4.	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Audit. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 4. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit. 7. Independensi anggota Komite Audit. 8. Keberadaan piagam Komite Audit.
5.	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan

		<p>Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>7. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>
6.	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. 5. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko. 7. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.
7.	Komite Tata Kelola Perusahaan (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite GCG. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite GCG. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite GCG. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite GCG. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite GCG. 7. Independensi anggota GCG.
8.	Komite-komite lain yang Dimiliki oleh Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite. 7. Independensi anggota komite.
9.	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan. 2. Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan. 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab

		Sekretaris Perusahaan.
10.	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal). 2. Jumlah anggota SPI. 3. Jabatan masing-masing anggota SPI. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI. 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun. 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan.
11.	Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
12.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Posisi kasus. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
13.	Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. 2. Daftar penyebaran informasi ke publik.
14.	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan
15.	Pernyataan Penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. 4. Keberadaan Board Manual. 5. Struktur tata kelola perusahaan. 6. Hasil penerapan GCG selama setahun. 7. Audit GCG (jasa attestasi) oleh eksternal auditor.
16.	Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Nilai-nilai perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan

		<p>Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya.</p> <p>5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal.</p> <p>6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.</p> <p>7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan</p>
--	--	--

Sumber:

1. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006
2. Pedoman Umum *Corporate Governance* (KNKG, 2006)

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Governance*

2.1.7.1 Independensi Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan Komisaris untuk membantu memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem audit di semua lini perusahaan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menjunjung tinggi lima prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan bertindak secara profesional dan independen untuk kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (BAPEPAM, 2006).

Komite Audit merupakan partisipan yang berperan penting dalam mengevaluasi, memeriksa, menginvestigasi, dan memberikan keyakinan (*assurance*) terhadap penerapan CG. Menurut Goodwin dan Seow (2002), *Cadbury Report* (1992) merekomendasikan bahwa dewan direksi perusahaan harus memiliki komite audit yang terpisah untuk mengawasi remunerasi direksi

eksekutif dan audit pelaporan keuangan. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki Komite Audit yang terpisah atau independen.

Beasley *et al.* (2000) menemukan bahwa para investor, auditor, dan direksi percaya bahwa komite audit yang kuat dan efektif dapat membantu auditor eksternal dalam mengaudit penipuan catatan akuntansi dan meningkatkan tingkat kualitas pengungkapan. Ho dan Wong (2001) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki Komite Audit yang independen lebih cenderung memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi. Ditemukan bahwa persentase komite audit independen yang lebih tinggi dalam perusahaan dapat memantau pengelolaan sebuah perusahaan, dengan demikian dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan atau penipuan. Oleh karena itu, Ho dan Wong mengemukakan bahwa independensi komite audit berhubungan positif dengan kinerja perusahaan dan kualitas pengungkapannya.

2.1.7.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan aktiva, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya. Menurut McNally, Eng, dan Hasseldine (1982) dalam Muhamad *et al.* (2009), ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dominan dalam praktik pengungkapan oleh karena tekanan yang dialami perusahaan baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan Singhvi dan Desai (1971) dalam Muhamad *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar menggunakan informasi-informasi yang ada

untuk tujuan manajerial, khususnya untuk pengungkapan internal pengawasan oleh manajemen puncak.

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *corporate governance* dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Maingot dan Zeghal (2008) mengenai analisis pengungkapan informasi CG oleh bank-bank di Kanada. Dalam penelitian ini, Maingot dan Zeghal (2008) menyatakan bahwa bank-bank dengan ukuran yang besar menjadi pokok perhatian atau objek yang dapat diteliti lebih bagi investor, salah satunya mengenai CG. Maingot dan Zeghal (2008) juga menyatakan bahwa bank yang berukuran lebih besar mempunyai anggaran lebih banyak untuk hubungan investor dan mereka dapat menyediakan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan laporan tahunan mereka. Dari pendapat dan penelitian Maingot dan Zeghal (2008) dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula kuantitas dan ragam pemangku-pemangku kepentingan yang terkait, sehingga perusahaan perlu untuk menyediakan pengungkapan yang lebih luas agar dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

2.1.7.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya

guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut (Warsono dkk.,2009).

Dalam pengaruhnya terhadap praktik pengungkapan, Muhamad *et al.* (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih besar dibanding dengan yang lainnya memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Lebih lanjut, Singhvi dan Desai (1971) mendukung pendapat Muhamad *et al.* (2009) dengan menyatakan pendapatan yang lebih besar memotivasi manajemen untuk menyediakan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memberikan jaminan kepada investor. Selain itu, profitabilitas perusahaan yang meningkat juga dapat berasal dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Semakin bertambahnya sumber pendanaan yang didapat dari pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan semakin mempunyai kesempatan dalam mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dapat meningkatkan labanya. Seiring dengan meningkatnya kapasitas atau sumber pendanaan perusahaan, maka jumlah dan ragam pemangku kepentingan akan semakin banyak. Hal ini mengakibatkan pengungkapan informasi yang mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Pengungkapan informasi ini digunakan sebagai respon tanggung jawab perusahaan atas penggunaan dana pemangku kepentingan.

Dalam prakteknya, profitabilitas dapat diukur melalui beberapa rasio, yaitu: *profit margin (profit margin on sales)*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan laba per lembar saham. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan menggunakan ROE (*Return on Equity*), yang merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan total ekuitas.

2.1.7.4 Leverage

Leverage atau *debt ratio* adalah variabel yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu untuk menguji determinan dari pengungkapan perusahaan. Rasio *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Endrian, 2010). Dalam hubungannya dengan praktik pengungkapan, Jensen dan Meckling (1976) dalam Aljifri dan Hussainey (2007) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih luas karena perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengakibatkan timbulnya biaya pengawasan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan perusahaan tersebut mengurangi biaya pengawasan dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan kreditur-kreditur.

Banyak ukuran yang digunakan untuk mewakili tingkat *leverage* suatu perusahaan, yaitu *debt to asset*, *long term debt to total equity*, *debt to equity*, dan *debt service coverage*. Dalam penelitian ini, tingkat *leverage* yang digunakan adalah *debt to equity ratio*, yang menunjukkan seberapa besar total ekuitas yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pembiayaan hutang (Endrian, 2010).

2.1.7.5 Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri sebagai determinan dalam praktik pengungkapan CG telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Wallace *et al.* (1994) dalam Alsaeed (2006) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan cenderung berbeda antara satu sektor industri dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini karena masing-masing sektor memiliki karakteristik yang unik satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut Sayogo (2006) menyatakan bahwa keanggotaan sebuah perusahaan dalam suatu sektor industri akan mempengaruhi struktur politik perusahaan tersebut, yang pada akhirnya perusahaan-perusahaan pada sektor industri yang sama akan memiliki pola pengungkapan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap sektor industri memiliki pola pengungkapan yang berbeda, karena masing-masing sektor industri memiliki keunikan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Klasifikasi industri yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang termuat dalam *Fact Book* yang terbagi dalam 9 sektor industri. Klasifikasi industri menurut Bursa Efek Indonesia adalah:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Industri dasar dan Kimia
4. Aneka industri
5. Industri barang konsumsi
6. *Property* dan *real estate*
7. Infrastruktur, utilitas, dan transportasi
8. Keuangan

9. Perdagangan dan jasa investasi

Identifikasi klasifikasi industri menggunakan variabel *dummy*, yaitu 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam jenis industri yang dimaksud dan 0 untuk perusahaan yang tidak termasuk dalam industri yang dimaksud. Dalam kasus *dummy*, untuk variabel klasifikasi industri, yang akan dipakai dalam pengukuran hanya delapan variabel, dengan kata lain sampel berkurang satu. Sampel yang berkurang itu akan digunakan sebagai pembanding (Ghozali, 2006).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pengungkapan laporan tahunan telah dilakukan. Namun, masih sedikit penelitian yang meneliti tentang pengungkapan *corporate governance*. Hal ini mungkin disebabkan karena isu mengenai *corporate governance* baru muncul setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.

Rini (2010) meneliti tentang luas pengungkapan *Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya, Rini (2010) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan CG, yaitu besaran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris. Media yang menjadi objek penelitiannya adalah *website* perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CG.

Selanjutnya, Muhamad *et al.* (2009) meneliti determinan-determinan pada pengungkapan informasi *corporate governance* oleh *Malaysian PLCs* (Perusahaan-perusahaan Malaysia yang terdaftar atau terpublikasi). Dalam penelitiannya, Muhamad *et al.* (2009) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan CG, yaitu Independensi Komite Audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, jenis industri, dan ukuran auditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad *et al.* (2009) ini menunjukkan bahwa *Leverage*, ukuran perusahaan, dan jenis industri berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CG.

Lebih lanjut, Aljifri dan Hussainey (2007) meneliti determinan-determinan dari informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Uni Emirat Arab. Dalam penelitiannya, Aljifri dan Hussainey (2007) mendefinisikan pengungkapan informasi *forward-looking* sebagai informasi yang terkait dengan rencana saat ini dan peramalan masa depan yang memungkinkan investor dan pengguna lain untuk menilai kinerja keuangan masa depan perusahaan. Dalam penelitiannya, Aljifri dan Hussainey mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi *forward-looking*, yaitu, sektor industri, ukuran perusahaan, *debt ratio*, profitabilitas, dan ukuran auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *debt ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Uni Emirat Arab.

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	PENELITI	VARIABEL	TEKNIK ANALISIS	HASIL
1.	Rini (2010)	<p>Independen: Besaran perusahaan, umur <i>listing</i> perusahaan, Kepemilikan dispersi, Perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris</p> <p>Dependen: Luas Pengungkapan CG</p>	Regresi Berganda	<p>a. Besaran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CG.</p> <p>b. Umur <i>listing</i> perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan.</p>
2.	Safitri (2008)	<p>Independen Variabel: Profitabilitas</p> <p>Variabel Kontrol: Ukuran perusahaan, listing status, auditor status, jenis industri, dispersed ownership level</p> <p>Dependen: Tingkat pengungkapan CG</p>	Regresi Berganda	<p>a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CG.</p> <p>b. Ukuran perusahaan dan listing status berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CG.</p> <p>c. Profitabilitas bersama-sama variabel kontrol lainnya berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CG.</p> <p>d. Perusahaan lebih tertarik untuk membuat informasi menjadi transparan dan tersedia bagi seluruh <i>stakeholder</i>, daripada berfokus</p>

				<p>pada kebutuhan dan keinginan <i>shareholder</i> dalam konteks pengungkapan CG. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kategori yang paling diungkapkan oleh perusahaan dalam Laporan Tahunan adalah kategori tanggung jawab sosial.</p>
3.	Muhamad <i>et al.</i> (2009)	<p>Independen: Proporsi Direktur independen dalam Komite Audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i>, jenis industri, dan auditor</p> <p>Dependen: Kualitas Pengungkapan CG</p>	Regresi Berganda	<p>a. <i>Leverage</i>, ukuran perusahaan, dan jenis industri berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG.</p> <p>b. Independensi komite audit, profitabilitas, dan auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG.</p>
4.	Aljifri dan Hussainey (2007)	<p>Independen: Sektor industri, ukuran perusahaan, <i>debt ratio</i>, profitabilitas, dan ukuran auditor.</p> <p>Dependen: Pengungkapan informasi <i>forward-looking</i>.</p>	Regresi Berganda	<p>a. Profitabilitas dan <i>debt ratio</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi <i>forward-looking</i>.</p> <p>b. Sektor industri, ukuran perusahaan, dan ukuran auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan</p>

				informasi <i>forward-looking</i> .
5.	Pramono (2011)	<p>Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, <i>leverage</i>, dan klasifikasi industri</p> <p>Dependen: Kualitas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>.</p>	Regresi Berganda	<p>a. Klasifikasi Industri berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG.</p> <p>b. Ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG.</p>
6.	Sayogo (2006)	<p>Independen: Profitabilitas, jumlah dewan independen, tingkat persebaran modal, ukuran perusahaan, dan harga saham.</p> <p>Dependen: Kualitas Pengungkapan CG.</p>	Regresi Berganda	<p>a. Ukuran perusahaan dan jumlah dewan independen berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG.</p> <p>b. Profitabilitas, tingkat persebaran modal, dan harga saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG.</p>

7.	Kusumawati (2007)	<p>Independen: <i>Profitability. Control Variable: Size, listing status, auditor status, industry type, and dispersed ownership.</i></p> <p>Dependent: <i>Voluntary GCG disclosure level.</i></p>	<p><i>Descriptive statistics and multiple Regression Analysis.</i></p>	<p>a. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap level pengungkapan GCG.</p> <p>b. Ukuran perusahaan, dan status auditor berpengaruh positif terhadap level pengungkapan GCG.</p> <p>c. Listing status dan kepemilikan dispersi memiliki signifikansi pengaruh yang sangat kecil terhadap level pengungkapan GCG.</p>
----	-------------------	---	--	--

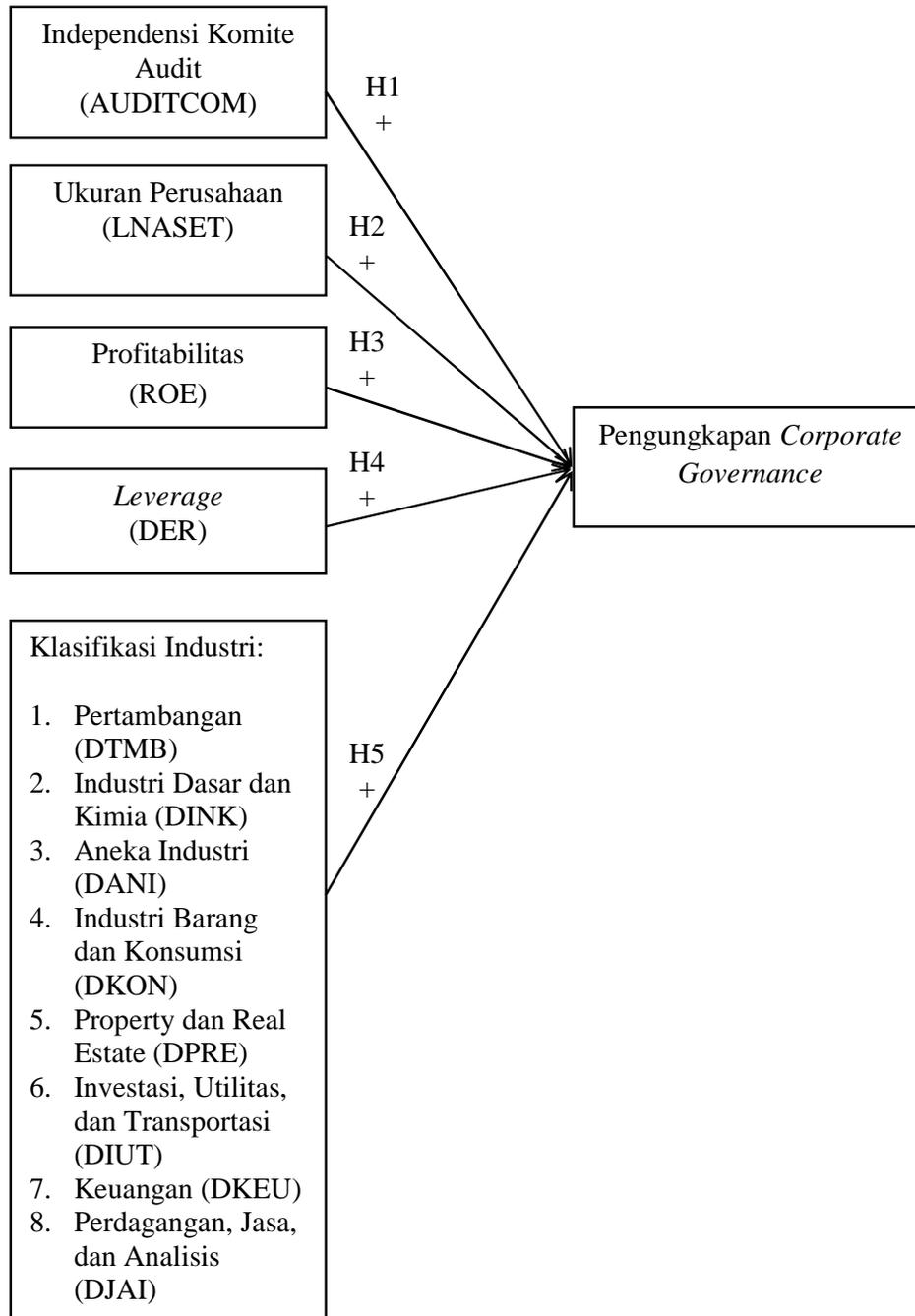
Sumber : Berbagai jurnal

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang dipaparkan, faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan CG adalah independensi komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan klasifikasi industri.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Independensi Komite Audit

Salah satu komite penunjang yang dibentuk oleh dewan komisaris adalah Komite Audit. Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-29/PM/2004, Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan Komite Audit, setiap Emiten atau Perusahaan Publik berkewajiban untuk memiliki Komite Audit dan pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*). Adapun ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diatur dalam Pedoman Umum GCG Indonesia tahun 2006 (KNKG), adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- b. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;

Yuen *et al.* (2009) mendiskusikan komposisi, fungsi, tanggung jawab, dan dampak Komite Audit terhadap pelaksanaan *corporate governance*. Untuk dapat memenuhi fungsi pengawasan Komite Audit secara efektif, Komite Audit harus terdiri dari sumber daya yang memadai, independen, kompeten, mendalami

bidang keuangan (*financially literate*), dan dikompensasi dengan tepat (Yuen *et al.*, 2009).

Komite Audit merupakan salah satu mekanisme kontrol atas organ perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi. Keefektifan fungsi Komite Audit dalam bekerja dapat melindungi kepentingan dari stakeholder yang menginginkan pengungkapan yang transparansi, jujur, dan profesional. Selain itu, kinerja komite audit yang baik dapat menambah nilai bagi *principal* yang menginginkan keselarasan kepentingan dengan *agent* (manajer perusahaan) sebagai pelaksana bisnis perusahaan. Penelitian terdahulu (Klein, 2002; Davidson, *et al.*, 2005; dalam Yuen, *et al.*, 2009) mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara Independensi Komite Audit dengan keefektifan *corporate governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.2 Ukuran Perusahaan

Perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan para pemangku kepentingan. Hubungan yang lebih kompleks ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, jenis, dan tuntutan pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya kompleksitas tersebut, maka

perusahaan berusaha menyediakan informasi-informasi yang relevan. Selanjutnya, sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa setiap keputusan, kepentingan, dan aktivitas bisnis perusahaan dipengaruhi sekaligus mempengaruhi pemangku kepentingan, maka perusahaan yang memiliki hubungan lebih kompleks akan mempunyai tuntutan yang lebih besar. Untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan tersebut, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi CG dengan lebih luas. Selain hal tersebut, peningkatan tingkat pengungkapan perusahaan akan mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi (Sayogo, 2006).

Beberapa penelitian (Zeghal dan Maingot, 2002; Sayogo, 2006; dan Safitri, 2008) menunjukkan hasil yang positif antara ukuran perusahaan, yang diprosikan dengan total asset perusahaan, dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.3 Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Muhamad *et al.* (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.

Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan ragam pemangku kepentingan yang mempercayakan sebagian hartanya untuk disertakan dalam modal perusahaan. Bertambahnya sumber pendanaan ini akan memacu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan cenderung naik.

Pada praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai CG sebagai respon tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh perusahaan. Dengan laporan informasi CG yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.4 *Leverage*

Endrian (2010) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Muhamad *et al.* (2009) menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi, khususnya informasi keuangan dalam rangka untuk meyakinkan kreditur jangka panjang perusahaan bahwa perusahaan mempunyai sumber daya yang cukup untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Aljifri dan Hussainey (2007) mengungkapkan bahwa karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menyebabkan biaya pengawasan (*monitoring costs*) yang lebih tinggi, maka perusahaan berusaha mengurangi biaya tersebut dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan kreditur. Hal ini sesuai dengan teori *agency* yang menerangkan tentang keselarasan kepentingan dari *principal* dengan *agent* mengenai pendelegasian wewenang dengan berkurangnya biaya monitoring. Dari pendapat para peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

2.4.5 Klasifikasi Industri

Wallace *et al.* (1994) dalam Alsaed (2006) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan memiliki kecenderungan berbeda antara industri yang berbeda pula, hal ini menggambarkan keunikan karakteristik yang mereka miliki. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Aljifri dan Hussainey (2007) yang menyatakan bahwa sektor-sektor industri yang ada akan mengadopsi kebijakan, pengukuran, dan penilaian akuntansi serta teknik pengungkapan yang berbeda dan hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam tingkat pengungkapan. Sektor industri yang berbeda juga menyebabkan perbedaan ragam dan jumlah pemangku kepentingan, sehingga perusahaan akan cenderung memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan luas pengungkapan antar sektor industri yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Klasifikasi Industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan hal-hal seperti variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi, dan sampel penelitian, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasi

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Governance* yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CG merupakan pengungkapan informasi tata kelola perusahaan serta prinsip-prinsip yang mengatur tentang perusahaan, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dan dikomunikasikan kepada publik dengan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Pengungkapan CG dalam laporan tahunan ini diukur dengan indeks pengungkapan CG perusahaan-perusahaan yang diteliti.

Metode yang digunakan untuk mengukur variabel dependennya adalah dengan mengukur indeks pengungkapannya. Indeks adalah sebuah rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur satu variabel pada

kurun waktu / lokasi tertentu, relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Cara mengukur indeks yang telah dibentuk tersebut adalah dengan mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan menggunakan nilai dikotomis, yaitu nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan serta 0 untuk item yang tidak diungkapkan (Rini, 2010), sehingga akan didapat skor pengungkapan yang berbentuk angka prosentase. Tabel pengungkapan yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan CG dikembangkan oleh Kusumawati (2007) yang bersumber dari Keputusan BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006 dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* (KNKG, 2006). Tabel pengungkapan tersebut terdiri dari 16 klasifikasi yang kemudian dibagi lagi menjadi 93 item seperti yang tercantum dalam tabel 2.1 di bab 2.

Indeks pengungkapan CG pada laporan tahunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Bhuiyan dan Biswan, 2007 dalam Rini, 2010):

$$\text{IPCG} = \frac{\text{total skor item yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{skor maksimum yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan}} \quad (3.1)$$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit adalah tingkat independen komite audit yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, baik hubungan kepentingan dengan pihak perusahaan maupun hubungan keluarga sedarah dengan pihak-pihak dalam

perusahaan (BAPEPAM, 2006). Ditemukan bahwa Komite Audit yang memiliki proporsi anggota independen lebih banyak cenderung memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi (Ho dan Wong, 2001). Komite Audit dapat memantau pengelolaan sebuah perusahaan, dengan demikian dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan atau penipuan. Variabel ini diproksikan dengan perbandingan proporsi jumlah anggota Komite Audit independen dan jumlah seluruh anggota Komite Audit (Mohamad dan Sulong, 2010).

$$\text{Independensi Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit Independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}} \quad (3.2)$$

3.1.2.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset perusahaan menggambarkan kekayaan perusahaan. Beberapa penelitian mengenai pengungkapan CG dalam laporan penilitan menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh secara signifikan dengan kualitas pengungkapan CG (Muhamad et al., 2009; Maingot dan Zeghal, 2008; dan Sayogo, 2006). Total aset perusahaan kemudian diubah dalam bentuk *natural log* agar data yang didapat tidak terlalu besar.

3.1.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan ROE (*Return on Equity*). Aljifri dan

Hussainey (2007) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pengungkapan dalam laporan tahunan. ROE merupakan proporsi laba bersih terhadap total ekuitas.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (3.3)$$

3.1.2.4 *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Endrian, 2010). Tingkat *leverage* pada penelitian ini diukur dengan *debt to equity ratio*. Muhamad *et al.* (2009) menemukan bahwa tingkat *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CG. *Debt to equity ratio* merupakan proporsi total hutang terhadap total ekuitas.

$$\text{Debt to equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}} \quad (3.4)$$

3.1.2.5 **Klasifikasi Industri**

Klasifikasi industri merupakan pengelompokan jenis industri. Klasifikasi industri yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang termuat dalam *Fact Book* yang terbagi dalam 9 sektor industri. Klasifikasi industri menurut Bursa Efek Indonesia adalah:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Industri dasar dan kimia
4. Aneka industri

5. Industri barang konsumsi
6. *Property* dan *real estate*
7. Infrastruktur, utilitas, dan transportasi
8. Keuangan
9. Perdagangan dan jasa investasi

Identifikasi klasifikasi industri menggunakan variabel *dummy*, yaitu 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam jenis industri yang dimaksud dan 0 untuk perusahaan yang tidak termasuk dalam industri yang dimaksud. Dalam kasus *dummy*, untuk variabel klasifikasi industri, yang akan dipakai dalam pengukuran hanya delapan variabel, dengan kata lain sampel berkurang satu. Sampel yang berkurang itu adalah industri Pertanian yang akan digunakan sebagai pembanding (Ghozali, 2006). Industri ini dihilangkan karena tingkat pengungkapan CG dalam industri ini cenderung lebih rendah dibanding industri lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia yang dirilis pada bulan Februari 2011. Jumlah populasi sampel tersebut adalah 45 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut (Pramono, 2011) :

1. Perusahaan yang secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011.

2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dalam bentuk bahasa Indonesia dan atau selain bahasa Indonesia pada tahun 2010 dan atau 2011.
3. Perusahaan yang mengalami keuntungan pada tahun 2010 dan atau 2011, karena hipotesis bersifat positif, artinya semakin tinggi nilai profitabilitasnya, semakin tinggi tingkat pengungkapannya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45. Sumber data yang akan digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan LQ-45, laporan tahunan, dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data tersebut diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Diponegoro, *Indonesian Capital Market Directory*, dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Data-data tersebut bersifat time series, artinya data tersebut dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Dokumen-dokumen dan data-data merupakan laporan LQ-45, laporan tahunan, laporan keuangan yang

diperoleh dari Pojok BEI Universitas Diponegoro, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), dan website BEI www.idx.co.id.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* untuk menentukan jumlah pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan yang diteliti. *Content analysis* dilakukan dengan membaca laporan tahunan setiap perusahaan sampel dengan memberi kode informasi yang terkandung di dalamnya menurut kerangka *corporate governance* yang dipilih.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 16. Metode analisis yang digunakan antara lain: analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi umum mengenai data yang akan diuji dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara proporsi komite audit independen dalam komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan klasifikasi industri terhadap pengungkapan *Corporate Governance* adalah regresi berganda. Model yang

digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance* dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IPCG} = & \beta_0 A + \beta_1 \text{AUDITCOM} + \beta_2 \text{LNASET} + \beta_3 \text{ROE} + \beta_4 \text{DER} + \beta_5 \text{DTMB} + \\ & \beta_6 \text{DINK} + \beta_7 \text{DANI} + \beta_8 \text{DKON} + \beta_9 \text{DPRE} + \beta_{10} \text{DIUT} + \beta_{11} \text{DKEU} + \\ & \beta_{12} \text{DJAI} + \varepsilon \end{aligned} \quad (3.5)$$

Keterangan :

IPCG	: Indeks Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>
AUDITCOM	: Independensi Komite Audit
LNASET	: Ukuran perusahaan
ROE	: Profitabilitas
DER	: Tingkat <i>leverage</i>
DTMB	: <i>Dummy</i> Pertambangan
DINK	: <i>Dummy</i> Industri Dasar dan Kimia
DANI	: <i>Dummy</i> Aneka Industri
DKON	: <i>Dummy</i> Industri Barang Konsumsi
DPRE	: <i>Dummy</i> <i>Property dan Real Estate</i>
DIUT	: <i>Dummy</i> Investasi, Utilitas, dan Transportasi
DKEU	: <i>Dummy</i> Keuangan
DJAI	: <i>Dummy</i> Perdagangan, Jasa, dan Analisis
ε	: <i>Error term</i>

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik sebagai berikut:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006).

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analistik grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

2. Analisis Statistik

Uji yang digunakan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S) adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghozali (2006) cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai

yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 . Selain menggunakan nilai *tolerance* dan *VIF*, cara yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat multikolinearitas adalah dengan melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen. Jika tingkat korelasi masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kemudian Ghozali (2006) menyatakan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas. Cara pertama adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Dasar untuk menganalisis grafik plot adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara yang kedua untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan Uji Park. Cara bekerja Uji Park adalah dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006). Jika variabel

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam uji autokorelasi adalah uji Lagrange Multiplier (LM test), yang akan menghasilkan Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-Godfrey (BG test) dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) ut menggunakan *autogresive* model. Dalam hasil output analisis SPSS, jika koefisien parameter untuk residual lag 2 (lag_2) memberikan probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statisik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikan. Jika nilai probabilitas signifikan ≤ 0.05 maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan ≥ 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara bersama-

sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi ≤ 0.05 maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam praktiknya, ukuran yang digunakan untuk menilai koefisien determinasi adalah nilai Adjusted R^2 . Tidak seperti nilai R^2 yang dapat menimbulkan bias, nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model.